



RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN JOMBANG

2025



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jombang dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025 dengan tepat waktu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan acuan perencanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama satu tahun dan merupakan penjabaran tahunan dari RPD dan Renstra 2024-2026. Adapun Renja ini disusun berdasar dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara rinci berpedoman pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dari Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan dukungan APBD di Tahun 2025.

Oleh karena itu, dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, serta monitoring dan evaluasi kebijakan. Semoga dengan disusunnya Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2025 dapat memberi manfaat dalam upaya tercapainya serapan anggaran dan target kinerja yang rasional, profesional, akuntabel, dan transparan untuk pembangunan yang berasaskan keadilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jombang, 16 Juli 2024

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Jombang



DAFTAR ISI

JUDUL.....		i
KATA PENGANTAR.....		ii
DAFTAR ISI.....		iii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Landasan Hukum.....	2
1.3	Maksud dan Tujuan.....	5
1.4	Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah...	32
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	33
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	48
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	50
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	50
3.2	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	51
3.3	Program dan Kegiatan.....	55
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	66
BAB V	PENUTUP.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah ialah suatu proses dalam rangka penyusunan atau tahapan-tahapan dalam kegiatan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada/tersedia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial daerah atau suatu lingkungan wilayah pada jangka waktu tertentu. Dalam rangka penyusunan tahapan-tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut perlu terlibat berbagai unsur pemangku kepentingan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan peraturan yang di dalamnya mengatur tentang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Peraturan tersebut menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu proses dalam rangka menentukan kegiatan maupun tindakan yang tepat di masa depan. Keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari kualitas perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Mendukung hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai salah satu Perangkat Daerah, memiliki tugas untuk melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang untuk selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Pembangunan Daerah merupakan suatu upaya atau proses yang mana Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakatnya bersama-sama mengelola segala macam sumber daya yang ada di daerah. Dengan pengelolaan sumber daya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkat serta meratanya pembangunan baik di sektor infrastruktur, kewilayahan, ekonomi, pemerintahan, maupun pembangunan manusia. Secara sistematis, upaya-upaya di bidang tersebut akan meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat termasuk melalui terbuka lebarnya lapangan usaha, kesempatan atau lapangan kerja, fasilitas publik yang semakin baik sehingga daya saing antar daerah juga bergerak selaras.

Oleh karena itu, dalam proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berpedoman pada Rencana

Perangkat Daerah (RPD) Kabupaten Jombang 2024-2026 serta pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang 2024-2026 yang telah terlebih dahulu disusun. Penyusunan Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis ini diharapkan dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang selaras sehingga konsistensi dalam perencanaan dapat terwujud dengan baik.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025. Sedangkan RKA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 merupakan dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kabupaten Jombang. Oleh karena itu, Rencana Kerja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kabupaten Jombang.

Adapun dasar hukum yang merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang digunakan untuk menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 Nomor 11/D);
23. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang;
24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026; dan

25. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 050/844/415.01/2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang 2025 ini adalah tersedianya informasi rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang untuk tahun 2025. Rencana kerja ini menyajikan program dan kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2025 dan sekaligus menjadi tolok ukur dalam pencapaian kinerja dalam satu tahun tersebut. Adapun tujuan dari disusunnya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Memudahkan seluruh aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan.
3. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengendalian kinerja terkait program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.
4. Memudahkan jajaran aparatur Bappeda dalam memahami sekaligus menilai arah kebijakan, program, dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 dilakukan sesuai dengan sistematika penulisan yang runtut dan baik seperti di bawah ini.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD

Dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang yang disusun harus berkualitas. Hal ini dikarenakan dari dokumen Rencana Kerja tersebut harus dapat dipastikan kesinambungan atau keselarasan program, kegiatan, serta sub kegiatannya sehingga dapat mendukung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan penyusunan dokumen Rencana Kerja yang berkualitas, maka diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dan pencapaiannya terhadap Rencana Strategis yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya. Evaluasi ini juga menjadi salah satu bentuk dari prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap hasil dari pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Fungsi dari adanya evaluasi ini adalah untuk memenuhi ketersediaan informasi-informasi yang berguna untuk penentuan target serta sasaran dari Rencana Strategis 2024-2026. Evaluasi ini memiliki sejumlah fungsi yang utama dalam analisis kebijakan. Hal ini dikarenakan evaluasi memiliki beberapa tujuan yang diantaranya adalah meningkatnya kualitas kebijakan serta program yang ada serta mengetahui keberhasilan dari suatu kebijakan tersebut. Selain itu, evaluasi juga digunakan untuk melihat keterpenuhan dari aspek akuntabilitas publik. Aspek akuntabilitas publik ini sangat penting karena menunjukkan tanggung jawab dari pemerintah kepada masyarakat atau publik yang merupakan pemilik dari dana dan penerima dari manfaat itu sendiri. Dengan kata lain, evaluasi ini merupakan salah satu cara atau proses untuk memperoleh masukan bagi pengambil kebijakan yang akan datang.

Secara umum, Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan yang ada di tahun tersebut. Dukungan pembiayaan pelaksanaan kegiatan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang didukung oleh APBD Pemerintah Kabupaten Jombang.

Total alokasi anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2023 adalah sebesar Rp13.922.197.121 dengan realisasi mencapai Rp12.813.173.136 atau 92,03 persen dengan rincian seperti tertera pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran per Program Tahun Anggaran 2023

No.	Program	Anggaran	Realisasi Tahun 2023	
			Anggaran	Persentase (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.283.015.421	8.187.898.075	88,20%
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.599.006.550	1.598.448.562	99,97%
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.877.241.850	1.865.319.104	99,36%
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.162.933.300	1.158.277.395	99,60%

Berdasarkan besar penyerapan tersebut, diketahui bahwa terdapat 7,97 persen anggaran yang tidak terserap dari alokasi anggaran yang sudah ditetapkan dengan nilai sebesar Rp1.109.023.985. Ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti berikut.

1. Realisasi anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar 88,20 persen dikarenakan terdapat penyesuaian dengan kebutuhan tahun 2023.
2. Realisasi anggaran pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah sebesar 99,97 persen dikarenakan terdapat penyesuaian dengan kebutuhan tahun 2023.

3. Realisasi anggaran pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebesar 99,36 persen dikarenakan terdapat penyesuaian dengan kebutuhan tahun 2023.
4. Realisasi anggaran pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebesar 99,60 persen dikarenakan terdapat penyesuaian dengan kebutuhan tahun 2023.

Tabel 2.2 (Tabel T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Percentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	N/A	71,3	73,54	73,54	100%	N/A	N/A	N/A
		Percentase Keselarasan Program RKPD dengan RPD	57,12%	N/A	N/A	N/A	N/A	55,89%	55,89%	97,84
		Percentase Capaian Kinerja Program RKPD yang mencapai target.	88,78%	94,21	94,73	94,73	100%	88,44%	88,44%	99,61
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Percentase Dokumen Perencanaan Pembangunan	100%	100	100	100	100%	100%	100%	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
		Daerah Yang Ditetapkan Tepat Waktu								
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	10 Dokumen	2	6	6	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	40
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Analisis Data dan Informasi yang dimanfaatkan dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	N/A	96	96	96	100%	N/A	N/A	N/A
		Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pendukung Dokumen Perencanaan Daerah	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	90%	90
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	8 Dokumen	48	6	6	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	25
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RKPD dengan capaian kinerja kategori Tinggi	N/A	84	86	86	100%	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
		Percentase Capaian Kinerja Program RKPD dengan Kategori Tinggi	92%	N/A	N/A	N/A	N/A	89%	89%	96,74
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	24 Laporan	296	8	8	100%	8 Laporan	8 Laporan	33,33
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Percentase Keselarasan Program RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD	85,89%	98,25	98,4	98,4	100%	85,31%	85,31%	99,32
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Percentase Keselarasan Program Renja PD dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	96,96%	96	90	90	100%	96,92%	96,92%	99,96
		Percentase ketersediaan data pendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	64,00%	N/A	N/A	N/A	N/A	60,00%	60,00%	93,75
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	236 Dokumen	4	1	1	100%	68 Dokumen	68 Dokumen	28,81

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	N/A	158	4	4	100%	N/A	N/A	N/A
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	10 Laporan	318	2	2	100%	3 Laporan	3 Laporan	30
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	43 Dokumen	2	1	2	200%	12 Dokumen	12 Dokumen	27,90
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	N/A	39	4	4	100%	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	22 Laporan	40	2	2	100%	7 Laporan	7 Laporan	31,81
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Program Renja PD dengan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	97%	96	90	90	100%	95%	95%	97,94
		Persentase ketersediaan data pendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%					100%	100%	100
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	69 Dokumen	5	1	1	100%	21 Dokumen	21 Dokumen	30,43
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	N/A	41	4	4	100%	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	10 Laporan	160	2	2	100%	3 Laporan	3 Laporan	30
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30 Dokumen	0	1	1	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	26,67
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	N/A	17	4	4	100%	N/A	N/A	N/A
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	13 Laporan	36	2	2	100%	4 Laporan	4 Laporan	30,77
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	Persentase Keselarasan Program Renja PD dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	92%	97,68	99	99	100%	87%	87%	94,57
		Persentase ketersediaan data pendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	64%	N/A	N/A	N/A	N/A	60%	60%	93,75

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan									
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31 Dokumen	14	2	3	150%	9 Dokumen	9 Dokumen	29,03
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	N/A	19	4	4	100%	N/A	N/A	N/A
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	7 Laporan	38	2	2	100%	2 Laporan	2 Laporan	28,57
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	49 Dokumen	2	3	4	133%	14 Dokumen	14 Dokumen	28,57

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahannya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahannya	N/A	13	4	4	100%	N/A	N/A	N/A
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahannya	7 Laporan	47	2	2	100%	2 Laporan	2 Laporan	28,57
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kategori tinggi	N/A	77,78	82	82	100%	N/A	N/A	N/A
		Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	92,73%	N/A	N/A	N/A	N/A	88,57%	88,57%	95,51
		Persentase peningkatan Inovasi Daerah	N/A	10	10	10	100%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Capaian Inovasi Daerah	150 Inovasi	N/A	N/A	N/A	N/A	45 Inovasi	45 Inovasi	30

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil kelitbangaan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dimanfaatkan	N/A	100	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah dokumen hasil kelitbangaan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dimanfaatkan	6 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	33,33
5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	3 Laporan	2	2	2	100%	1 Laporan	1 Laporan	33,33
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil kelitbangaan bidang sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan	N/A	75	67	67	100%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah dokumen hasil kelitbangaan bidang sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan	9 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Dokumen	3 Dokumen	33,33
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	9 Dokumen	4	3	3	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	33,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Percentase hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan	N/A	83	80	80	100%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah dokumen hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	4 Dokumen	4 Dokumen	33,33
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	9 Dokumen	5	4	5	125%	3 Dokumen	3 Dokumen	33,33
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3 Dokumen	1	1	1	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	33,33
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Percentase Produk inovasi dan TTG yang dikembangkan	N/A	67	67	67	100%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Inovasi Krenova	246 Inovasi	N/A	N/A	N/A	N/A	80 Inovasi	80 Inovasi	32,52
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	9 Dokumen	4	3	5	167%	3 Dokumen	3 Dokumen	33,33
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	6 Laporan	2	1	1	100%	2 Laporan	2 Laporan	33,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100	100	100	100%	100%	100%	100
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	100	100	100	100%	100%	100%	100
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2	3	3	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	28,57
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	5	6	6	100%	5 Laporan	5 Laporan	33,33
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100	100	100	100%	100%	100%	100
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/Bulan	24	45	45	100%	56 Orang/Bulan	56 Orang/ Bulan	87,5
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	4	4	4	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	33,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	1	1	1	100%	1 Laporan	1 Laporan	33,33
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	48 Laporan	16	16	16	100%	16 Laporan	16 Laporan	33,33
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Percentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian PD Bappeda	100%					100%	100%	100
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	121 Paket					46 Paket	46 Paket	38,02
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	25 Orang							
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	96%	92	100	100	100%	94%	94%	97,92
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	146	9	9	100%	6 Paket	6 Paket	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	201 Paket	14	70	70	100%	12 Paket	12 Paket	5,97
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	27 Paket	195	9	9	100%	13 Paket	13 Paket	48,15
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21 Paket	42	4	4	100%	36 Paket	36 Paket	171,43
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	15	8	8	100%	8 Paket	8 Paket	33,33
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 Dokumen	36	3	3	100%	36 Dokumen	36 Dokumen	400
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115 Laporan	20	45	43	96%	35 Laporan	35 Laporan	30,43
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase realisasi Pengadaan Barang Penunjang pada BAPPEDA	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Bangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	100	100	100%	100%	100%	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	25	25	25	100%	12 Laporan	12 Laporan	16,67
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	36	24	24	100%	12 Laporan	12 Laporan	16,67
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100	100	100	100%	100%	100%	100
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	1	1	1	100%	2 Unit	2 Unit	100
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	26	26	26	100%	24 Unit	24 Unit	96
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2	3	3	100%	3 Unit	3 Unit	100
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	202 Unit	115	142	142	100%	116 Unit	116 Unit	57,42

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=5+7+9	11=10/4
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jombang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang berkualitas, unggul, dan profesional dapat menjadi sarana dalam perbaikan pola pembangunan di tingkat daerah. Dengan demikian, diharapkan daerah dapat dengan leluasa mengekspresikan keinginan pembangunannya sesuai dengan potensi lokal dan kemampuan yang dimiliki daerah. Di lain sisi, era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Jombang. Oleh karena itu, investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukannya sehingga memunculkan peluang besar pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang selaku lembaga teknis di bidang perencanaan harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat mulai dari proses sampai dengan tataran pelaksanaan/implementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Namun disisi lain seiring berubah-rubahnya regulasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Berangkat dari fenomena tersebut, Bappeda Kabupaten Jombang selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Mendukung terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Mendukung keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Mendukung tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jombang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jombang, mempunyai tugas Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Untuk menjalankan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jombang, mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Memperhatikan Perubahan sistem pemerintahan daerah sebagai wujud diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peranan perencanaan pada masa yang akan datang diharapkan lebih menonjolkan peran sebagai perumus, fasilitator, mediator dan inovator di dalam pelaksanaan pembangunan serta dituntut untuk lebih mampu mengelola perubahan yang semakin kompleks dan cepat. Secara umum pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Jombang adalah:

1. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
4. Menyusun Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Jombang (RENSTRA);

5. Menyusun Rencana Kerja Tahunan BAPPEDA Kabupaten Jombang (RENJA PD);
6. Mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah dan atau melakukan koordinasi hasil-hasil penelitian;
7. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD kabupaten) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) maupun DAK;
8. Melakukan koordinasi perencanaan diantara Perangkat Daerah lain dalam Lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kabupaten Jombang.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas BAPPEDA Kabupaten Jombang;
2. Adanya Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) pada Kabupaten/Kota.
3. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif;
4. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta;
5. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran. Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan.

Tabel 2.3 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)			86,00	92,89	93,18	93,26	94,26		93,18	93,26	
2.	Indeks Kualitas Kelitbangan dan Inovasi Daerah (IKKID)			63,70	83,86	85,66	87,09	52,69		85,66	87,09	
3.	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah			80,10	80,65	80,66	80,67	80,17		80,66	80,67	

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja yang merupakan hasil dari penilaian pada indikator kinerja utama, target, realisasi, serta tingkat capaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang maka dapat diberikan penjelasan terkait masing-masing indikator sebagai berikut.

Indikator Sasaran I

Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)

Indeks Kualitas Perencanaan yang selanjutnya disebut IKP adalah salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang. IKP tersebut diukur berdasarkan tiga aspek yaitu seperti dibawah ini.

1. Aspek Proses (D1)

Pada aspek proses ini, terdapat dua variabel dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Persentase Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Sesuai Kaidah Perencanaan (D1.1)

Pengukuran ini dilakukan dengan memperhatikan ketepatan waktu penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan keterlibatan unsur masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

$$\text{Skor D1.1} = \frac{\text{Realisasi D1.1}}{\text{Target D1.1} + \text{Target D1.2}} \times 20\% \text{ (bobot)}$$

b. Persentase Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Sesuai Kaidah Perencanaan (D1.2)

Persentase penyelenggaraan tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketepatan waktu penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten dan keterlibatan unsur masyarakat dalam Musrenbang Kabupaten sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

$$\text{Skor D1.2} = \frac{\text{Realisasi D1.2}}{\text{Target D1.1} + \text{Target D1.2}} \times 20\% \text{ (bobot)}$$

Adapun untuk mengukur skor dari Aspek Proses (D1) adalah dengan menjumlahkan skor D1.1 dengan skor D1.2.

Skor D1 = Skor D1.1 + Skor D1.2

2. Aspek Isi (D.2)

Pada aspek isi terdapat empat variabel seperti berikut ini.

- a. Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam RKPD (D2.1)

Usulan Musrenbang yang diakomodir tersebut dihitung melalui rumus berikut.

$$\frac{\text{Jumlah usulan Jombang Berkadang yang diakomodir} + \text{Jumlah usulan prioritas yang diakomodir}}{\text{Jumlah usulan Jombang Berkadang yang masuk} + \text{Jumlah usulan prioritas yang masuk}} \times 100\%$$

- #### b. Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD (D2.2)

Perhitungan persentase keselarasan program RKPD dengan RPJMD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2020 yang besarnya ditentukan berdasarkan perhitungan total dari kesesuaian nomenklatur program, kesesuaian indikator program, serta kesesuaian target indikator program yang tertuang antara RPJMD dan RKPD.

$$\begin{array}{rcl} \text{Keselarasan} & & \text{Keselarasan} \\ \text{RKPD dengan} & = & \text{Keselarasan Perencanaan} \\ & & \quad \text{Murni} \times 70\% \text{ (bobot)} \\ \text{RPJMD} & & + \quad \text{Perencanaan Perubahan} \\ & & \quad \times 30\% \text{ (bobot)} \end{array}$$

- c. Persentase Keselarasan Program Renja PD dengan RKPD (D2.3)

Rumus untuk menghitung persentase keselarasan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 dengan melakukan perhitungan total dari kesesuaian nomenklatur program, kesesuaian indikator program, kesesuaian target indikator program yang tertuang pada dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

$$\begin{array}{l} \text{Keselarasan} \\ \text{Renja PD} \\ \text{dengan RKPD} \end{array} = \frac{\text{Keselarasan Perencanaan}}{\text{Murni} \times 70\% \text{ (bobot)}} + \frac{\text{Keselarasan}}{\text{Perencanaan Perubahan} \times 30\% \text{ (bobot)}}$$

d. Persentase Dokumen Perencanaan Ditetapkan Tepat Waktu (D2.4)

Dokumen tersebut dikatakan ditetapkan tepat waktu apabila sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pada peraturan tersebut, dinyatakan bahwa Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota paling lambat satu minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan. Persentase tersebut dapat dihitung menggunakan rumus berikut.

$$\frac{\text{Tanggal ditetapkan dokumen RKPD (n+1) - Keterlambatan}}{\text{Tanggal harus ditetapkan dokumen RKPD (n+1)}} \times 100\%$$

Skor D2 atau Aspek Isi dapat dihitung dengan menjumlah persentase dari masing-masing variabel sebagai berikut.

$$\text{Skor D2} = \text{Skor D2.1} + \text{Skor D2.2} + \text{Skor D2.3} + \text{Skor D2.4}$$

3. Aspek Tindak Lanjut Hasil Perencanaan

Pada aspek tindak lanjut hasil perencanaan ini, hanya terdiri dari satu variabel saja.

$$\frac{\text{Jumlah program dalam RKPD dengan capaian kategori tinggi tahun n}}{\text{Jumlah program dalam RKPD tahun n}} \times 100\%$$

Capaian yang dikatakan berkategori tinggi adalah program yang capaian kinerjanya di atas 75 persen. Adapun skor D3.1 dapat dihitung menggunakan rumus berikut.

$$\text{Skor D3.1} = \frac{\text{Realisasi D3.1}}{\text{Target D3.1}} \times 30\% \text{ (bobot)}$$

Oleh karena itu, nilai IKP dapat diukur dengan penjumlahan skor D1, D2, dan D3 sebagaimana berikut.

$$\text{IKP} = \text{Skor D1} + \text{Skor D2} + \text{Skor D3}$$

Indikator Sasaran II

Indeks Kualitas Kelitbang dan Inovasi Daerah (IKKID)

Indikator sasaran kedua ini merupakan salah satu bentuk dari komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang untuk mendukung Inovasi Daerah serta kualitas kelitbang Kabupaten Jombang. Hasil Penilaian Indeks Inovasi

Daerah ini mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021 yang kemudian disesuaikan dengan Surat Menteri dalam Negeri Nomor 002.6/3857/SJ tanggal 6 Juli 2022 perihal Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan *Innovative Government Awards* (IGA) 2022. Indikator sasaran ini didukung dengan berbagai macam penyusunan dokumen penelitian pada Program Penelitian dan Pengembangan yang ada di bidang Penelitian dan Pengembangan serta dengan pengembangan inovasi masyarakat melalui adanya kegiatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Berbasis Kinerja (PPMBK) dan Penyelenggaraan Anugerah Kreativitas Masyarakat. Formulasi yang digunakan adalah sebagai berikut.

IKKID diperoleh dari rumus penjumlahan (0,40) Indeks Kelitbang, (0,35) Indeks Krenova, dan (0,25) Indeks Inovasi Daerah.

1. Indeks Kelitbang merupakan persentase pemanfaatan hasil kelitbang
2. Indeks Krenova merupakan nilai skor banyaknya inovasi peserta Krenova
3. IID merupakan Indeks Inovasi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri

$$SPD = \sum_{i=1}^{15} Skor\ Indikator\ Satuan\ Pemda\ ke-i$$

$$Skor\ Jumlah\ Inovasi = Jumlah\ Inovasi \times 0,38$$

$$SID = \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=16}^{35} Skor\ Indikator\ Satuan\ Inovasi\ ke\ i) Inovasi\ ke\ j}{n} + Skor\ Jumlah\ Inovasi$$

$$Skor\ Total = SPD + SID$$

Keterangan:

n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah

i adalah nomor indikator

j adalah nomor inovasi

SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah

SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah

$$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$$

Keterangan:

- Skor total maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).
- Skor total maksimum adalah 250.
- Skala IID adalah 0 s.d. 100.

Dengan proporsi aspek sebagai berikut:

- Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (25,20%), terdiri dari:
 - 1) 3 variabel;
 - 2) 15 indikator; dan
 - 3) Jumlah skor maksimal SPD senilai 63 (25,20%).
- Aspek Satuan Inovasi Daerah (74,80%), terdiri dari:
 - 1) 5 variabel;
 - 2) 21 indikator (20 indikator SID senilai 111 atau 44,40% dan 1 indikator Jumlah Inovasi apabila maks. Senilai 76 atau 30,40%); dan
 - 3) Jumlah Skor Maksimal SID senilai 187 (74,80%).

Berikut skor dan kategori Indeks Inovasi Daerah.

Kategori	Rentang Skor
Sangat Inovatif	60,01 - 100,00
Inovatif	35,00 – 60,00
Kurang Inovatif	0,01 - 34,99
Tidak Dapat Dinilai	0

Indikator Sasaran III

Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah

Indikator Sasaran yang ketiga ini merupakan nilai evaluasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mana merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana implementasi

SAKIP dilaksanakan, maka dilakukan penilaian terhadap AKIP Perangkat Daerah selama satu tahun dan n-1 yang terdiri dari komponen-komponen berikut.

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 persen.
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30 persen.
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15 persen.
4. Evaluasi Kinerja dengan bobot 25 persen.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan. Dokumen tersebut berisi program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dalam kurun waktu satu tahun. Oleh karenanya, dokumen Rencana Kerja bisa menjadi tolok ukur untuk penilaian realisasi perencanaan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2025. Adapun tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah seperti berikut.

1. Menciptakan keharmonisan dan keterpaduan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Memberikan kemudahan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang.
3. Memberikan pedoman terkait pelaksanaan pengendalian kinerja pada program dan kegiatan rentang satu tahun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang.
4. Memberikan kemudahan bagi para aparatur sipil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rentang waktu satu tahun untuk memahami dan menilai kebijakan dan program hingga kegiatan.

Selain itu, berikut merupakan beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dalam upaya meningkatkan kualitas produk perencanaan pembangunan.

1. Kemampuan sumber daya manusia yang masih terbatas.
2. Perubahan Peraturan Perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.

3. Kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat PD belum optimal yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan.
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu adalah kegiatan menelaah ulang bukti-bukti dalam rangka memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan, standar, maupun rencana dan norma yang telah ditetapkan. Adapun reviu terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan sesuai dengan analisis kebutuhan. Evaluasi dilakukan berkaitan dengan program/kegiatan/sub kegiatan, lokasi, indikator kinerja, target capaian, serta pagu indikatif. Terkait dengan hal tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan, dan lokasi yang tertera pada Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tidak mengalami perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026. Akan tetapi, terdapat perubahan pada besaran pagu indikatif dan besaran jumlah anggaran yang diusulkan dalam rangka pembiayaan untuk berbagai macam rencana kegiatan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 berisi rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja sekaligus informasi pendanaannya, program-program prioritas pembangunan daerah, serta perkiraan pagu anggaran dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Di dalam RKPD Kabupaten Jombang akan dimuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu satu tahun. Harapan dari adanya dokumen tersebut adalah dapat menciptakan komitmen dan meningkatkan kepastian kebijakan dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, RKPD juga menjadi acuan dalam penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah dalam tahun yang bersangkutan. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4 (Tabel T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Kab. Jombang				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Kab. Jombang				
PERENCANAAN					PERENCANAAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100 Persen	8.631.257.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100 Persen	8.631.257.001			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100 Persen	16.999.250	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100 Persen	16.999.250			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	12.760.250	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	12.760.250			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	4.239.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	4.239.000			

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100 Persen	7.015.069.945	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100 Persen	7.015.069.945	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	6.825.967.745	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	6.825.967.745	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	183.096.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	183.096.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.698.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.698.200	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16 Laporan	4.308.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16 Laporan	4.308.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD BAPPEDA	100 Persen	27.600.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD BAPPEDA	100 Persen	27.600.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkappannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	27.600.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkappannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	27.600.000			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	95 Persen	787.867.650	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Percentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	95 Persen	787.867.650			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	23.518.950	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	23.518.950			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	67 Paket	175.067.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	67 Paket	175.067.400			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	13.750.900	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	13.750.900			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	177.533.600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	177.533.600			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	26.200.800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	26.200.800			

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	6.000.000			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan	365.796.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan	365.796.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	409.407.120	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	409.407.120			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	150.000.000			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	259.407.120	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	259.407.120			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 persen	374.313.036	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 persen	374.313.036			

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	76.710.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	76.710.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	212.793.149	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	212.793.149	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	151 Unit	84.809.887	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	151 Unit	84.809.887	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Percentase Keselarasan Program RKPD dengan RPD	56,21 persen	1.738.856.600	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Percentase Keselarasan Program RKPD dengan RPD	56,21 persen	1.738.856.600	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Percentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Tepat Waktu	100 persen	1.302.587.900	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Percentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Tepat Waktu	100 persen	1.302.587.900	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	1.302.587.900	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	1.302.587.900			
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Percentase ketersediaan data dan informasi Pendukung Dokumen Perencanaan Daerah	95 persen	201.486.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Percentase ketersediaan data dan informasi Pendukung Dokumen Perencanaan Daerah	95 persen	201.486.000			
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	201.486.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	201.486.000			
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Percentase Capaian Kinerja Program RKPD dengan kategori Tinggi	90 persen	234.782.700	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Percentase Capaian Kinerja Program RKPD dengan kategori Tinggi	90 persen	234.782.700			
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	9 Laporan	234.782.700	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	9 Laporan	234.782.700			

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Percentase Keselarasan Program RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD	85,68 Persen	2.313.968.228	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Percentase Keselarasan Program RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD	85,68 Persen	2.313.968.228	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Percentase Keselarasan Program Renja PD dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	96,94 persen	771.391.300	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Percentase Keselarasan Program Renja PD dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	96,94 persen	771.391.300	
		Percentase ketersediaan data pendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	62 persen				Percentase ketersediaan data pendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	62 persen		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100 Dokumen	63.968.150	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100 Dokumen	63.968.150	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	10 Laporan	80.624.900	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	10 Laporan	80.624.900		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22 Dokumen	486.320.700	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22 Dokumen	486.320.700		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	16 Laporan	140.477.550	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	16 Laporan	140.477.550		
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Percentase Keselarasan Program Renja PD dengan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	96 persen	794.755.400	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Percentase Keselarasan Program Renja PD dengan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Percentase Keselarasan Program Renja PD dengan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	96 persen	794.755.400		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
		Percentase ketersediaan data pendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100 persen				Percentase ketersediaan data pendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100 persen		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25 Dokumen	166.756.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25 Dokumen	166.756.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	263.735.889	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	263.735.889	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen	246.405.300	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen	246.405.300	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 Laporan	117.858.211	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 Laporan	117.858.211			
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Percentase Keselarasan Program Renja PD dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	90 persen	747.821.528	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	Percentase Keselarasan Program Renja PD dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	90 persen	747.821.528			
	Percentase ketersediaan data pendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	62 persen			Percentase ketersediaan data pendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunannya Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	62 persen				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	273.204.628	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	273.204.628			

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	94.741.900	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	94.741.900			
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahana (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahana yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	270.861.500	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahana (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahana yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	270.861.500			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahana	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahana	3 Laporan	109.013.500	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahana	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahana	3 Laporan	109.013.500			
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	91,11 Persen	907.443.450	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	91,11 Persen	907.443.450			

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen hasil kelitbangen bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dimanfaatkan	1 dokumen	123.527.500	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen hasil kelitbangen bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dimanfaatkan	1 dokumen	123.527.500			
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	123.527.500	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	123.527.500			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil kelitbangen bidang sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan	3 dokumen	203.007.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil kelitbangen bidang sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan	3 dokumen	203.007.000			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	3 Dokumen	203.007.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3 Dokumen	203.007.000			
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil Kelitbangen Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan	4 dokumen	243.841.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil Kelitbangen Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan	4 dokumen	243.841.000			

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Dokumen	3	243.841.000	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Dokumen	3	243.841.000	
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Dokumen	1	106.025.000	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Dokumen	1	106.025.000	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi krenova	82 inovasi	231.042.950	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			Jumlah inovasi krenova	82 inovasi	231.042.950	
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Dokumen	3	193.847.450	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Dokumen	3	193.847.450	
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	37.195.500	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	37.195.500	

2.4.1. Perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 seperti yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 5 Agustus 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, dapat diketahui bahwa terdapat dua urusan penunjang yang akan dicapai di tahun 2025 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang yaitu Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan yang mana masing-masingnya memiliki empat program dan enam belas kegiatan seperti di bawah ini.

1. Urusan Perencanaan
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya
2. Urusan Penelitian dan Pengembangan
- Program Penelitian dan Pengembangan
- 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - 3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - 4) Pengembangan Inovasi dan Teknologi

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, program/kegiatan usulan pemangku kepentingan merupakan kajian yang mana diusulkan oleh pemangku kepentingan sebagai wujud dari salah satu pendekatan perencanaan. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut merupakan suatu bentuk dari pendekatan perencanaan *bottom-up*. Perencanaan *bottom-up* ini berlandaskan pada asas desentralisasi dan demokratisasi yang dapat dilakukan mulai dari Lembaga Swadaya Masyarakat, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, asosiasi, Perangkat Daerah maupun hasil dari usulan, penelitian lapangan, hingga pengamatan pada pelaksanaan Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya, hasil dari usulan-usulan tersebut dilakukan penelaahan terlebih dahulu untuk mengetahui keterkaitannya dengan isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Harapannya dengan telaah yang dilakukan tersebut, usulan dapat diakomodir sesuai dengan Perangkat Daerah yang memiliki program maupun kegiatan yang tepat dan sesuai.

Berdasar dari uraian tersebut, diketahui bahwa tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat dari pemangku kepentingan yang ditujukan atau perlu diakomodir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2025.

Tabel 2.4

Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2025 Kabupaten Jombang

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		N I	H I L		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan amanat konstitusi, anggaran negara dan anggaran daerah merupakan instrumen yang masing-masing digunakan untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Dalam rangka perumusan tujuan dan sasaran harus melihat juga seperti apa tujuan negara yang ingin dicapai dan seperti apa perencanaan negara yang akan dilakukan. Oleh karena itu, dalam perumusan tujuan dan sasaran Bappeda harus dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bappeda serta dilakukan telaah terhadap kebijakan nasional yang ada. Kebijakan Nasional tertuang dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2025 seperti berikut.

Tema Pembangunan

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Arah Prioritas Pembangunan Nasional

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan Kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa.
2. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, reformasi pengelolaan sampah.
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan

Agenda Pembangunan

Adapun apabila melihat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2045 diketahui terdapat 8 Agenda Pembangunan seperti di bawah ini.

1. Mewujudkan Transformasi Sosial
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola

4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan

Melihat arah-arah kebijakan yang ada di tingkat nasional tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya Renja Bappeda Tahun 2025 ini tidak mendukung secara langsung ke arah Prioritas Pembangunan Nasional. Akan tetapi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda ini memiliki fungsi yang secara tidak langsung mendukung tercapainya tujuan, sasaran maupun arah dari kebijakan nasional. Wujud dukungan dari Bappeda ini adalah dengan melakukan koordinasi untuk penyusunan, pengendalian, juga evauasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah seperti melakukan sinkronisasi, sinergitas, serta harmonisasi perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan di tingkat daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dari Renja Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2025 merupakan turunan penjabaran dari Rencana Strategis Bappeda yang didasarkan dari rumusan berbagai isu penting pada penyelenggaran tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dengan uraian seperti di bawah ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Bappeda Tahun 2025

Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	63,45	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas (IKP)	93,18
			Meningkatnya Kualitas Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Indeks Kualitas Kelitbangan dan Inovasi Daerah (IKKID)	85,66

Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target
			Meningkatnya	Nilai Evaluasi	80,66
			Akuntabilitas dan	AKIP Perangkat	
			Kinerja Perangkat	Daerah	
			Daerah		

Adapun berikut adalah formulasi dari masing-masing indikator sasaran di Bappeda Tahun 2025.

Tabel 3.2
Formulasi Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi/Rumus Perhitungan
Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)	<p>IKP diukur berdasarkan tiga aspek yaitu sebagai berikut.</p> <p>1. Aspek Proses (D.1)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Sesuai Kaidah Perencanaan (D1.1) b. Persentase Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Sesuai Kaidah Perencanaan (D1.2) <p>Perhitungan nilai adalah sebagai berikut.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\text{Skor D1.1} = \frac{\text{Realisasi D1.1}}{\text{Target D1.1} + \text{Target D1.2}} \times \text{bobot (20\%)}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\text{Skor D1.2} = \frac{\text{Realisasi D1.2}}{\text{Target D1.1} + \text{Target D1.2}} \times \text{bobot (20\%)}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\text{Skor D1} = \text{Skor D1.1} + \text{Skor D1.2}$ </div> <p>2. Aspek Isi (D.2)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam RKPD (D2.1) b. Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD (D2.2) c. Persentase Keselarasan Program Renja PD dengan RKPD (D2.3) d. Persentase Dokumen Perencanaan Ditetapkan Tepat Waktu (D2.4) <p>Perhitungan nilai adalah sebagai berikut.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\text{Skor D2.1} = \frac{\text{Realisasi D2.1}}{\text{Target D2.1} + \text{Target D2.2} + \text{Target D2.3} + \text{Target D2.4}} \times \text{bobot (50\%)}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\text{Skor D2.2} = \frac{\text{Realisasi D2.2}}{\text{Target D2.1} + \text{Target D2.2} + \text{Target D2.3} + \text{Target D2.4}} \times \text{bobot (50\%)}$ </div>

Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi/Rumus Perhitungan
	<p>Skor D2.3 = $\frac{\text{Realisasi D2.3}}{\text{Target D2.1} + \text{Target D2.2} + \text{Target D2.3} + \text{Target D2.4}} \times \text{bobot (50\%)}$</p> <p>Skor D2.4 = $\frac{\text{Realisasi D2.1}}{\text{Target D2.1} + \text{Target D2.2} + \text{Target D2.3} + \text{Target D2.4}} \times \text{bobot (50\%)}$</p> <p>Skor D2 = Skor D2.1 + Skor D2.2 + Skor D2.3 + Skor D2.4</p> <p>3. Aspek Tindak Lanjut Hasil Perencanaan (D.3) Persentase Capaian Program dalam RKPD dengan Kategori Tinggi (D3.1)</p> <p>D3.1 = $\frac{\text{Jumlah program dalam RKPD dengan capaian kategori tinggi tahun n}}{\text{Jumlah program dalam RKPD tahun n}} \times 100\%$</p> <p>Skor D3.1 = $\frac{\text{Realisasi D3.1}}{\text{Target D3.1}} \times \text{bobot (30\%)}$</p> <p>Nilai IKP tahun 2025 dihitung dengan rumus berikut.</p> <p>IKP = Skor D1 + Skor D2 + Skor D3</p>
Indeks Kualitas Kelitbang dan Inovasi Daerah (IKKID)	<p>IKKID diperoleh dari rumus perhitungan penjumlahan beberapa indeks berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Indeks Kelitbang yang merupakan persentase pemanfaatan hasil kelitbang sebesar 40%. Indeks Krenova yang merupakan nilai skor banyaknya inovasi peserta Krenova sebesar 35%. Indeks Inovasi Daerah (IID) yang merupakan indeks dari Kementerian Dalam Negeri sebesar 25%. <p>Perhitungan Skor Total</p> <p>$SPD = \sum_{i=1}^{15} \text{Skor Indikator Satuan Pemda ke } i$</p> <p>$\text{Skor Jumlah Inovasi} = \text{Jumlah Inovasi} \times 0,38$</p> <p>$SID = \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=1}^{15} \text{Skor Indikator Satuan Inovasi ke } i) \text{ Inovasi ke } j}{n} + \text{Skor Jumlah Inovasi}$</p> <p>$\text{Skor Total} = SPD + SID$</p> <p>Keterangan:</p> <p>n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah</p> <p>i adalah nomor indikator</p> <p>j adalah nomor inovasi</p> <p>SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah</p> <p>SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah</p>

Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi/Rumus Perhitungan										
	<p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skor Indikator Jumlah Inovasi diperoleh dari Jumlah Inovasi dikalikan bobot sebesar 0,38 dengan Skor Maksimal Indikator Jumlah Inovasi adalah 76. Apabila jumlah inovasi yang diperhitungkan lebih dari 200 inovasi maka akan dinilai sebesar skor maksimal tersebut. - Skor Total diperoleh dari penjumlahan Skor Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID). <p>Perhitungan Indeks Inovasi Daerah</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> $\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$ </div> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID). - Skor Total Maksimum adalah 250. - Skala IID adalah 0 s.d. 100. <p>Dengan proporsi aspek sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (25,20%), terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) 3 Variabel; 2) 15 Indikator; dan 3) Jumlah Skor Maksimal SPD senilai 63 (25,20%). - Aspek Satuan Inovasi Daerah (74,80%), terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) 5 Variabel; 2) 21 Indikator (20 indikator SID senilai 111 atau 44,40% dan 1 indikator Jumlah Inovasi apabila maks. senilai 76 atau 30,40%); dan 3) Jumlah Skor Maksimal SID senilai 187 (74,80%). <p>Berikut skor dan kategori indeks inovasi daerah tahun 2022:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Kategori</th> <th style="text-align: center;">Rentang Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Sangat Inovatif</td> <td style="text-align: center;">60,01 - 100,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Inovatif</td> <td style="text-align: center;">35,00 – 60,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kurang Inovatif</td> <td style="text-align: center;">0,01 - 34,99</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Tidak Dapat Dinilai</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pemerintah daerah dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif, dan tidak dapat dinilai setelah divalidasi dan <i>quality control</i> akan menghasilkan nilai indeks inovasi daerah yang akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.</p>	Kategori	Rentang Skor	Sangat Inovatif	60,01 - 100,00	Inovatif	35,00 – 60,00	Kurang Inovatif	0,01 - 34,99	Tidak Dapat Dinilai	0
Kategori	Rentang Skor										
Sangat Inovatif	60,01 - 100,00										
Inovatif	35,00 – 60,00										
Kurang Inovatif	0,01 - 34,99										
Tidak Dapat Dinilai	0										
Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai hasil evaluasi SAKIP Bappeda Tahun n oleh Tim APIP dengan komponen penilaian sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Kinerja (25%) 										

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang memiliki peran sebagai pengarah atau koordinator dalam setiap program pembangunan dan sistem yang memudahkan Perangkat Daerah dalam rangka penentuan arah dan sasaran kegiatan sekaligus pengukuran tingkat kesuksesannya.

Pada tahun 2025 ini, terdapat 4 program dan 16 kegiatan yang akan dilaksanakan dengan pagu anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp12.106.285.301.

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Jombang
Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Urusan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	Jombang			12.106.285.301	APBD			
Sasaran Ke-1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah							17.350.991.125	
5.01	Perencanaan	Jombang			11.351.196.651				15.986.072.946
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Percentase Keselarasan Program RKPD dengan RPD	Jombang	56,21%	1.214.216.000				57,12% 1.463.772.690
		Percentase Capaian Kinerja Program RKPD yang mencapai target	Jombang	88,62%	0				88,78% 0
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Percentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Tepat Waktu	Jombang	100%	977.197.000				100% 1.045.994.175
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jombang	3 dokumen	977.197.000				2 dokumen 1.045.994.175

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program RKPD dengan kategori Tinggi	Jombang	86%	96.163.000			92%	193.728.865	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jombang	8 laporan	96.163.000		8 laporan	193.728.865		
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi Pendukung Dokumen Perencanaan Daerah	Jombang	96%	140.856.000			100%	224.049.650	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jombang	4 dokumen	140.856.000		2 dokumen	224.049.650		
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD	Jombang	85,68%	1.559.614.101			85,89%	4.128.845.707	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Program Renja PD dengan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jombang	96%	482.955.319			97%	1.922.127.840	
		Persentase ketersediaan data pendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jombang	100%				100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jombang	26 Dokumen	125.421.500		19 Dokumen		1.273.795.200	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jombang	4 Laporan	156.632.419		3 Laporan		438.594.720	
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jombang	11 Dokumen	123.355.150		8 Dokumen		62.852.400	
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jombang	4 laporan	77.546.250		4 laporan		146.885.520	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Program Renja PD dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jombang	96,92%	482.568.254		96,96%		1.329.404.736	
		Persentase ketersediaan data pendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jombang	60%			64%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jombang	3 dokumen	37.141.304		68 dokumen		431.528.350	
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jombang	5 laporan	75.595.200		3 laporan		138.605.258	
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jombang	6 dokumen	297.095.200		12 dokumen		314.787.550	
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jombang	4 laporan	72.736.550		7 laporan		444.483.578	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah	Persentase Keselarasan Program Renja PD dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayah	Jombang	90%	594.090.528		92%		877.313.131	
		Persentase ketersediaan data pendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah	Jombang	62%			64%			
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jombang	7 Dokumen	186.232.628		9 Dokumen		180.932.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jombang	4 Laporan	169.312.450			2 Laporan	141.381.131	
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Kewilayahan yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jombang	3 dokumen	98.373.450			14 dokumen	290.000.000	
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jombang	4 laporan	140.172.000			2 Laporan	265.000.000	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Jombang	100%	8.577.366.550			100%	10.393.454.549	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	Jombang	100%	15.311.750			100%	20.565.920	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jombang	3 dokumen	11.072.750			3 dokumen	15.474.304	
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jombang	5 laporan	4.239.000			5 laporan	5.091.616	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Jombang	100%	7.060.556.932			100%	7.967.846.750	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								(9)	(10)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jombang	45 Orang/bulan	6.858.454.732			64 Orang/bulan	7.738.175.750	
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jombang	4 Dokumen	196.096.000			4 Dokumen	223.654.500	
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jombang	1 Laporan	1.698.200			1 Laporan	1.699.500	
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jombang	16 Laporan	4.308.000			16 Laporan	4.317.000	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD BAPPEDA	Jombang	100%	27.600.000			100%	28.716.600	
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jombang	45 Paket	27.600.000			64 paket	28.716.600	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jombang	95%	680.635.650			96%	1.321.208.342	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jombang	8 Paket	23.518.950			8 Paket	28.884.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jombang	12 Paket	133.867.400		67 Paket		311.346.480	
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jombang	13 Paket	13.750.900		9 Paket		29.008.588	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jombang	36 Paket	177.433.600		7 Paket		313.798.944	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jombang	8 Paket	26.200.800		8 Paket		37.800.490	
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jombang	36 Dokumen	6.056.000		3 Dokumen		10.800.000	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jombang	36 Laporan	299.808.000		42 Laporan		589.569.840	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jombang	100%	427.407.120			100%	470.147.832	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jombang	36 Laporan	158.400.000		24 Laporan		174.240.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jombang	36 Laporan	269.007.120		24 Laporan		295.907.832	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Jombang	100%	365.855.098		100%		584.969.105	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jombang	2 Unit	76.710.000		2 Unit		84.381.000	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jombang	22 Unit	198.889.342		25 Unit		159.000.000	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jombang	0 Unit	0		3 Unit		162.487.920	
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jombang	151 Unit	90.255.756		202 Unit		179.100.185	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbang	Jombang	91,11%	755.088.650		92,73%		1.364.918.179	
		Jumlah Capaian Inovasi Daerah	Jombang	50 inovasi	0		55 inovasi		-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dimanfaatkan	Jombang	2 dokumen	119.987.000			2 dokumen	299.871.000	
5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jombang	2 laporan	119.987.000			1 laporan	174.515.000	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan	Jombang	3 dokumen	160.871.000			3 dokumen	269.763.500	
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jombang	3 dokumen	160.871.000			3 dokumen	269.763.500	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan	Jombang	4 dokumen	279.143.000			4 dokumen	451.967.475	
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jombang	3 dokumen	190.315.500			3 dokumen	324.134.000	
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jombang	1 dokumen	88.827.500			1 dokumen	127.833.475	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi krenova	Jombang	82 inovasi	195.087.650			84 inovasi	343.316.204	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jombang	3 dokumen	174.823.650			3 dokumen	280.643.044	
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jombang	1 laporan	20.264.000			2 laporan	62.673.160	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Mendaras dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah, maka diketahui bahwa fokus pada Bab IV ini adalah terkait dengan rencana kerja berikut pendanaan atau penganggarannya untuk kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di tahun 2025.

Dalam penentuan program, kegiatan, hingga aktivitas yang akan dilakukan pada tahun 2025 tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang menggunakan metode SMART. Metode ini merupakan singkatan dari *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound*. Spesifik di sini maksudnya adalah aktivitas dan program-program yang akan dilakukan telah dibuat dengan detail dan jelas. Penentuan ini juga telah memerhatikan keterukuran dengan maksud bahwa target yang yang ditetapkan sudah sesuai dan dapat digunakan untuk membantu dalam pencapaian target. *Achievable* atau bisa dicapai dengan artian bahwa apa yang akan dilaksanakan di tahun 2025 dengan target-target yang dibuat telah disusun secara raealistis sehingga bisa dicapai di tahun 2025 tersebut. *Relevant* memiliki maksud bahwa aktivitas dan program yang akan dilaksanakan selaras dengan kondisi dan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang. Untuk mencapai semua target tersebut, batas waktu pencapaian target juga ditetapkan yakni selama satu tahun di tahun 2025.

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah tersebut menghasilkan rencana pembangunan yang konkret dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran pembangunan

daerah. Adapun dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 terdapat empat program dan enam belas kegiatan. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2025 yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan rincian seperti berikut.



Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025

Kode	Sasaran/Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran Ke-1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)	Jombang	94,76		Dana Alokasi Umum	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN		Jombang		12.106.285.301	Dana Alokasi Umum	
5.01	PERENCANAAN		Jombang		2.773.824.451	Dana Alokasi Umum	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPD	Jombang	56,21%	1.214.214.650	Dana Alokasi Umum	
		Persentase Capaian Kinerja Program RKPD yang mencapai target	Jombang	88,62%	0	Dana Alokasi Umum	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Tepat Waktu	Jombang	100%	977.195.650	Dana Alokasi Umum	



Kode	Sasaran/Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jombang	3 dokumen	977.195.650	Dana Alokasi Umum	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Percentase Capaian Kinerja Program RKPD dengan kategori Tinggi	Jombang	86%	96.163.000	Dana Alokasi Umum	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jombang	8 laporan	96.163.000	Dana Alokasi Umum	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Percentase ketersediaan data dan informasi Pendukung Dokumen Perencanaan Daerah	Jombang	96%	140.856.000	Dana Alokasi Umum	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jombang	4 dokumen	140.856.000	Dana Alokasi Umum	



Kode	Sasaran/Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD	Jombang	85,68%	1.559.609.801	Dana Alokasi Umum	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Program Renja PD dengan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jombang	96%	482.955.319	Dana Alokasi Umum	
		Persentase ketersediaan data pendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jombang	100%		Dana Alokasi Umum	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jombang	4 Dokumen	125.421.500	Dana Alokasi Umum	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jombang	2 Laporan	156.632.419	Dana Alokasi Umum	



Kode	Sasaran/Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jombang	4 Dokumen	123.355.150	Dana Alokasi Umum	
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jombang	2 laporan	77.546.250	Dana Alokasi Umum	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Program Renja PD dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jombang	96,92%	482.568.254	Dana Alokasi Umum	
		Persentase ketersediaan data pendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jombang	60%		Dana Alokasi Umum	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jombang	3 dokumen	37.141.304	Dana Alokasi Umum	



Kode	Sasaran/Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jombang	5 laporan	75.595.200	Dana Alokasi Umum	
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jombang	6 dokumen	297.095.200	Dana Alokasi Umum	
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jombang	4 laporan	72.736.550	Dana Alokasi Umum	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah	Percentase Keselarasan Program Renja PD dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayah	Jombang	90%	594.086.228	Dana Alokasi Umum	
		Percentase ketersediaan data pendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah	Jombang	62%		Dana Alokasi Umum	



Kode	Sasaran/Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jombang	6 Dokumen	186.230.478	Dana Alokasi Umum	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jombang	5 Laporan	169.310.850	Dana Alokasi Umum	
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jombang	3 dokumen	98.373.200	Dana Alokasi Umum	
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jombang	4 laporan	140.171.700	Dana Alokasi Umum	
Sasaran Ke-2	Meningkatnya Kualitas Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Indeks Kualitas Kelitbang dan Inovasi Daerah (IKKID)	Jombang	85,22			



Kode	Sasaran/Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Jombang	91,11%	755.086.550	Dana Alokasi Umum	
		Jumlah Capaian Inovasi Daerah	Jombang	50 inovasi	0	Dana Alokasi Umum	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dimanfaatkan	Jombang	2 dokumen	119.986.000	Dana Alokasi Umum	
5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jombang	2 laporan	119.986.000	Dana Alokasi Umum	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan	Jombang	3 dokumen	160.871.000	Dana Alokasi Umum	
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jombang	3 dokumen	160.871.000	Dana Alokasi Umum	



Kode	Sasaran/Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan	Jombang	4 dokumen	279.142.000	Dana Alokasi Umum	
5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jombang	3 dokumen	190.314.500	Dana Alokasi Umum	
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jombang	1 dokumen	88.827.500	Dana Alokasi Umum	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi krenova	Jombang	82 inovasi	195.087.550	Dana Alokasi Umum	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jombang	3 dokumen	174.823.550	Dana Alokasi Umum	
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jombang	1 laporan	20.264.000	Dana Alokasi Umum	
Sasaran Ke-3	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Jombang	80,66			



Kode	Sasaran/Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Jombang	100%	8.577.366.550	Dana Alokasi Umum	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Percentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	Jombang	100%	15.311.750	Dana Alokasi Umum	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jombang	3 dokumen	11.072.750	Dana Alokasi Umum	
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jombang	5 laporan	4.239.000	Dana Alokasi Umum	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Jombang	100%	7.062.316.932	Dana Alokasi Umum	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jombang	45 Orang/bulan	6.858.454.732	Dana Alokasi Umum	
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jombang	4 Dokumen	197.856.000	Dana Alokasi Umum	



Kode	Sasaran/Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jombang	1 Laporan	1.698.200	Dana Alokasi Umum	
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jombang	16 Laporan	4.308.000	Dana Alokasi Umum	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD BAPPEDA	Jombang	100%	27.000.000	Dana Alokasi Umum	
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jombang	45 Paket	27.000.000	Dana Alokasi Umum	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jombang	95%	679.484.500	Dana Alokasi Umum	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jombang	8 Paket	23.518.900	Dana Alokasi Umum	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jombang	12 Paket	132.869.750	Dana Alokasi Umum	
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jombang	13 Paket	13.747.700	Dana Alokasi Umum	



Kode	Sasaran/Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jombang	36 Paket	177.409.700	Dana Alokasi Umum	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jombang	8 Paket	26.200.400	Dana Alokasi Umum	
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jombang	36 Dokumen	6.000.000	Dana Alokasi Umum	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jombang	36 Laporan	299.738.000	Dana Alokasi Umum	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jombang	100%	427.406.070	Dana Alokasi Umum	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jombang	24 Laporan	158.400.000	Dana Alokasi Umum	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jombang	36 Laporan	269.006.070	Dana Alokasi Umum	



Kode	Sasaran/Urusan/Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2025				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Jombang	100%	365.855.098	Dana Alokasi Umum	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jombang	2 Unit	76.710.000	Dana Alokasi Umum	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jombang	21 Unit	198.889.342	Dana Alokasi Umum	
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jombang	133 Unit	90.255.756	Dana Alokasi Umum	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2025 merupakan dokumen untuk pelaksanaan kegiatan pada Bappeda yang berdasarkan dari Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026. Oleh karena itu, Rencana Kerja Bappeda ini akan dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi sekaligus dalam proses menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut dan menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka diperlukan kaidah-kaidah dalam pelaksanaannya. Kaidah tersebut diantaranya adalah seperti di bawah ini.

1. Bappeda Kabupaten Jombang yang menjadi *leading sector* dan memiliki kewenangan terkait dengan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga kerja sama yang sesuai dengan standar dapat menghasilkan formulasi dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang mana akan diimplementasikan dalam bentuk target kinerja dan realisasi yang sesuai dengan kaidah serta aturan yang berlaku.
2. Seluruh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang memiliki tanggung jawab secara bersama-sama dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025. Seluruh pegawai juga harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya sesuai kewenangannya.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang diwajibkan untuk menjaga konsistensi keselarasan antara Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
4. Pemantauan sekaligus evaluasi terhadap Rencana Kerja akan dilakukan secara berkala.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025, maka isi dari dokumen tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Jombang, Juli 2024

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

